

Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Para calon kandidat tersebut telah diusung oleh masing-masing partai pendukung yang tentunya memiliki basis massa pendukung yang tidak sedikit dan terdapat persaingan elektabilitas sehingga berbagai macam cara ditempuh oleh kedua pasangan Capres dan Cawapres sebagai upaya untuk mendapatkan suara dan dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu yang dilakukan oleh kedua pasangan Capres dan Cawapres untuk mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat Indonesia dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia di bawah rata-rata dan ekonomi lemah adalah dengan melakukan sebuah pelanggaran dalam pemilu yaitu *money politic*. Dengan menggunakan strategi tersebut untuk menarik simpati para pemilih, baik para kandidat, tim sukses, ataupun para kader politik dalam kampanyenya memberikan sedikit uang untuk di iming-imingkan kepada masyarakat, sehingga mereka mau memberikan dukungan dan suara kepada kedua pasangan tersebut.

Money politic adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai.¹ *Money politic* adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk

¹ Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, [Http:// Www.Panwaslu, Jum'at](http://www.Panwaslu, Jum'at).

Berdasarkan pada diagram lingkaran diatas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk *money politic* di kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo pada pemilihan Presiden 2014 yang lebih sering dijumpai yaitu berupa uang. Hal ini bisa dibuktikan dengan 48,10% responden menerima *money politic* berupa uang, 29,00% responden menerima *money politic* berupa barang, dan 23,00% responden menerima *money politic* berupa fasilitas umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk *money politic* di kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo pada pemilihan Presiden 2014 yang lebih sering dijumpai yaitu berupa uang.

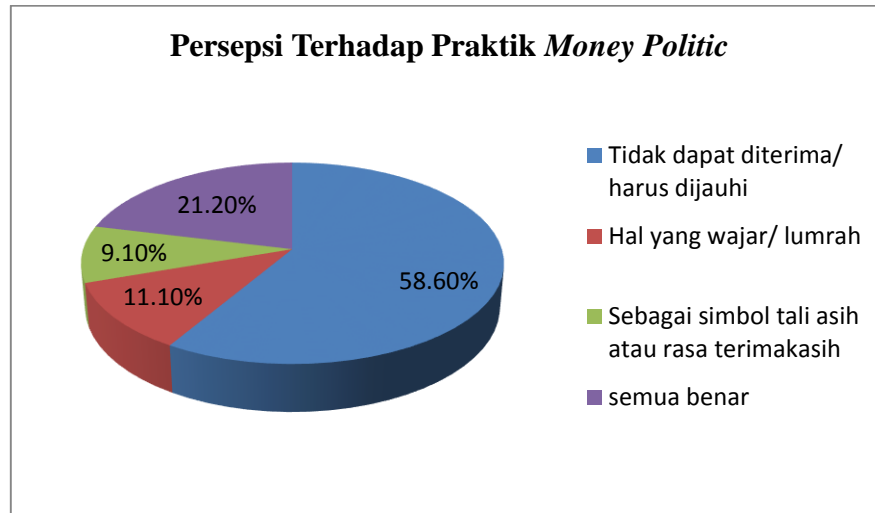
Penilaian tentang bentuk-bentuk *money politic* tersebut didapatkan dari pertanyaan yang ada pada angket nomer 6 pada kolom karakteristik sosial, ekonomi & politik responden yang menanyakan “apa saja bentuk-bentuk *money politic* pada kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?” pada pertanyaan tersebut disediakan 2 kolom jawaban antara Ya dan Tidak, yakni 1.Uang, 2. Barang (sembako, dll), 3. Perbaikan infrastruktur ((Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dll)).

Hal tersebut juga dapat dilihat berdasarkan diagram batang tentang bentuk-bentuk *money politic* di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

dibuktikan dengan sedikitnya responden yang memilih menjawab Ya hanya (38,33) 38% responden dibandingkan dengan responden yang memilih menjawab Tidak sebesar 60,67 (61%) responden dari ketiga pertanyaan indikator tersebut.

Pemilih pemula di kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo tidak dengan mudah menjatuhkan pilihan kepada calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden, semuanya itu membutuhkan proses yang cukup panjang. Tentunya terlebih dahulu mereka membandingkan dan mempertimbangkan para kandidat dengan melihat citra kandidat, visi-misi kandidat, serta program-program yang dimiliki dan ditawarkan oleh kandidat Capres dan Cawapres untuk memperbaiki Indonesia 5 tahun ke depan. Selain itu, pemilih pemula di kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo juga melihat salah satu bentuk strategi yang digunakan oleh pasangan kandidat Capres dan Cawapres untuk menarik simpati mereka yaitu *money politic*. Dimana *money politic* sudah dianggap menjadi senjata ampuh untuk menyukseskan kampanye dalam setiap pemilihan umum. Dalam hal ini, pemilih pemula bisa menilai secara langsung untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan politiknya.

Gambar 5.3



Berdasarkan pada diagram lingkaran diatas, dapat diketahui bahwa para pemilih pemula Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo mempunyai persepsi terhadap *money politic*, bahwasanya dari 99 responden yang menjawab tidak dapat diterima atau yang harus di jauhi sebanyak 58 orang (58,6 %), yang memilih sesuatu hal yang wajar/ lumrah atau perilaku yang tidak harus di jauhi sebanyak 11 orang (11,1 %), yang memilih dipandang sebagai simbol tali asih atau rasa terimakasih antar si pemberi dan si penerima sebanyak 9 orang (9,1 %), dan yang memilih secara keseluruhan ataupun yang dianggap semua benar sebanyak 21 orang (21,2 %). Dengan demikian sebagian besar pemilih pemula di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo menganggap bahwa *money politic* merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima atau yang harus di jauhi. Dalam hal ini, pemilih pemula di kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo sudah memiliki penilaian yang sangat baik terhadap adanya praktik *money politic*, sehingga pastinya pemilih pemula ini

juga bisa menentukan siapa pemimpin yang pantas untuk negara demi kemaslahatan umat.

Mengingat juga sebagian besar responden pemilih pemula kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo berusia 19 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, sehingga pola pikir para pemilih pemula sudah mulai rasional dan kritis. Meskipun memang kondisi psikologi yang dimiliki oleh pemilih pemula yaitu masih labil keadaan kejiwaannya, mereka umumnya juga mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, baik berupa pengaruh positif maupun negatif. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil kuesioner pada pertanyaan no. 2 yang menunjukkan bahwa dari 99 responden yang berusia 17 Tahun sebanyak 18 orang (18,2%), yang berusia 18 Tahun sebanyak 10 orang (10,1%), yang berusia 19 Tahun sebanyak 28 orang (28,3%), yang berusia 20 Tahun sebanyak 27 orang (27,3%), dan yang berusia 21 Tahun sebanyak 16 orang (16,2%). Sedangkan hasil kuesioner pada pertanyaan no. 5 yang menunjukkan bahwa dari 99 responden yang berstatus/berprofesi sebagai siswa sebanyak 22 orang (22,2%), berstatus/berprofesi sebagai Mahasiswa sebanyak 50 orang (50,5%), berstatus/berprofesi sebagai Karyawan Swasta sebanyak 24 orang (24,2%), berstatus/berprofesi sebagai Pedagang sebanyak 2 orang (2%), dan berstatus/berprofesi sebagai Lain-lain (Penjahit) sebanyak 1 orang (1%).

Disisi lain, ketika berbicara tentang *money politic* bahwasanya sulit disangkal untuk menuju transisi demokratisasi di Indonesia *money politic* sudah bukan hal yang tabu untuk diperbicangkan bahkan menurut kacamata pengamat politik, pemilihan Presiden 2014 berada dibawah bayang-bayang ancaman politik

uang. Kebanyakan sebab terjadinya *money politic* karena adanya kesempatan pada sebuah kondisi yang membuat calon kandidat melakukan sebuah jalan pintas untuk mengambil simpati masyarakat. Adapun beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:⁶

1. **Kemiskinan**, Angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang.
2. **Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik**, Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu.
3. **Kebudayaan**, saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

⁶ Hasunacha N, “Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu”, <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu> (Diakses 20 April 2016)

pemilih pemula Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo lebih cenderung memilih karena faktor budaya yang melekat pada jiwa bangsa Indonesia yaitu dalam bentuk ungkapan rasa terima kasih dan rasa balas budi terhadap si pemberi yang memberi uang/ barang/ fasilitas umum. Dalam hal ini, bahwa para calon kandidat berpendapat bahwa besar kemungkinan pemilih akan memilihnya ketika ia memberikan uang. Artinya, ada sedikit harapan bahwa uang yang disebarkan akan membuahkan hasil suara seperti yang diinginkan. Sistem *vote buying* (pembelian suara) memang tidak bisa dipungkiri juga bahwa uang yang dibagikan itu cukup mempengaruhi pilihan warga, terutama yang secara nominal, jumlahnya paling besar diantara yang dibagikan oleh para calon kandidat. Sebaliknya, ketika seorang calon kandidat tidak mengeluarkan uang untuk keperluan *vote buying*, besar kemungkinan ia tidak akan diperhatikan dan tentu tidak akan memperoleh suara yang signifikan. Dari perspektif para calon kandidat, pengaruh uang dan besaran nominal ini hampir disepakati oleh sebagian besar dari mereka. Mereka juga menganggap, praktik-praktik semacam ini bisa terjadi lantaran watak pemilih yang pragmatis. Tentu saja memang ada pemilih yang mengaku bahwa mereka menempatkan besaran nominal uang ini menjadi faktor utama yang memengaruhi preferensi mereka. Namun, satu hal yang semestinya tidak dilupakan ialah bahwa uang bukanlah instrumen yang berdiri sendiri. Selain uang, ikatan kekerabatan, persahabatan, dan kedekatan seseorang dengan figur calon kandidat atau tim sukses dan anggotanya juga merupakan instrumen yang cukup berpengaruh.

Pada penelitian Noor Rahman di Pati, Jawa Tengah terkait target, teknik, dan makna dari pembelian suara. Bahwa terdapat pengakuan banyak pemilih yang

bisa disimpulkan ketika menerima uang tersebut, mereka memaknainya dengan konstruksi yang beragam, tidak melulu sekedar sebagai pertukaran jual beli suara. Setidaknya, ada lima bentuk konstruksi makna uang yang dipahami oleh pemilih di Pati.⁷ *Pertama*, sebagian warga menganggap bahwa uang yang diterimanya itu sebagai rezeki. Mereka berpendapat bahwa sikap tidak mau menerimanya justru dianggap tidak baik, karena menolak rezeki sama halnya dengan menolak pemberian Tuhan. Disisi lain, menolak uang tersebut juga bisa menyinggung perasaan anggota tim sukses yang mendistribusikannya, sedangkan sebagian besar dari mereka adalah tetangga penerima dalam satu rukun tetangga (RT) sehingga ada rasa sungkan. Tidak hanya itu, ketika seseorang menolak pemberian tersebut, ia bisa dianggap “orang yang sombong” oleh orang yang memberi, apalagi jika penolak tersebut dari kelompok keluarga menengah ke bawah. Oleh karena itu, sebagian besar mereka kemudian menerimanya. Dengan demikian, logika penerima uang tersebut pada dasarnya jauh dari asumsi transaksi antara seorang pembeli dan penjual, seperti yang dibayangkan oleh para calon kandidat yang melakukan praktik *vote buying*. Para pemilih pun merasa bahwa mereka “tidak meminta” tetapi “diberi” sehingga mereka tidak memiliki beban dengan menerima uang tersebut. Bagi mereka, uang tersebut juga dianggap sebagai pemberian Cuma-Cuma (*gift*). *Kedua*, sebagian warga memaknai uang tersebut sebagai uang yang tidak jelas halal atau haramnya (*syubhat*). Meskipun menerimanya, mereka tidak membelanjakannya untuk keperluan konsumsi seperti makanan atau minuman yang nantinya masuk ketubuh mereka. Umumnya, mereka

⁷ Edward Aspinall, *Politik Uang Di Indonesia 'Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: POLGOV, 2015), 348-350.

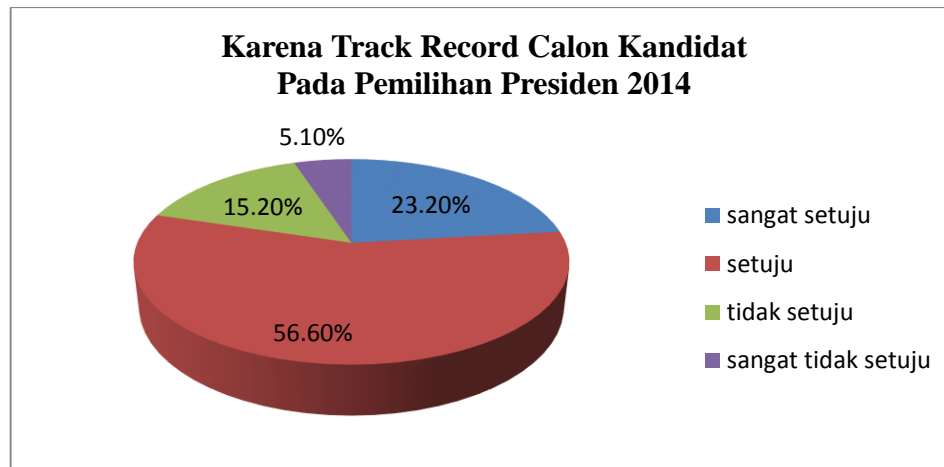
membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan selain konsumsi, seperti membeli bensin, membeli pulsa, serta membeli rokok. Hal ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki pertimbangan doktrin agama dalam menilai praktik *vote buying* yang sedang berlangsung. Namun, ada salah seorang calon kandidat yang kebetulan juga tokoh agama berpendapat bahwa boleh menerima uang itu selama diniatkan untuk melawan praktik tersebut, yakni dengan cara menerima uangnya tetapi soal menentukan pilihan harus berdasarkan hati nurani. *Ketiga*, sebagian warga memaknai uang itu sebagai upah pengganti waktu kerja mereka yang tersita untuk datang memilih ke TPS. Dengan demikian, meskipun libur kerja, mereka tetap mendapatkan penghasilan atau ganti ruginya. Dalam konteks ini, uang tentu bekerja untuk menggerakkan warga agar berpartisipasi dalam pemilihan, meskipun tidak dapat dipastikan juga bahwa pemberi itu yang akan dipilih. *Keempat*, sebagian warga memaknai uang tersebut sebagai uang mereka sendiri yang sudah selayaknya mereka terima kembali. Menurutnya, uang tersebut adalah uang rakyat yang sebelumnya “diambil” oleh para kandidat (khususnya petahana) selama menjabat sebagai anggota dewan, misalnya dengan cara korupsi. *Kelima*, sebagian warga memaknai uang tersebut sebagai media untuk memberi sanksi terhadap politisi (ini sesuai dengan jargon yang akhir-akhir ini berkembang, yaitu “ambil uangnya dan pilih calon kandidat sesuai kehendak anda”) yang tidak terpercaya. Politisi yang dimaksud ialah mereka yang telah terpilih pada periode sebelumnya tetapi selama ini tidak melakukan kerja programatik dan selalu pragmatis dan berinteraksi dengan warga; pendekatan terhadap warga dilakukan hanya pada momentum pemilu.

Pada dasarnya, sikap pemilih seperti disebutkan diatas tidak bisa dilepaskan dari kekecewaan mereka terhadap institusi politik yang ternyata tidak mampu menjamin kesejahteraan mereka. Mereka juga terlihat sinis terhadap kebanyakan politisi yang justru hanya sibuk dengan kepentingannya masing-masing, dan tidak segan-segan melakukan praktik korupsi. Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan ini membuat tantangan semakin berat ketika dikaitkan dengan upaya pengembangan kesadaran sebagai warga negara diantara pemilih, warga negara (aktif) yang menjadi subyek penting dalam proses perbaikan demokrasi. Dari pemaknaan yang beragam diatas, tentu saja tidak berlebihan jika dikatakan bahwa *vote buying* merupakan strategi pemenangan yang penuh ketidakpastian dan lebih banyak mengandung dimensi perjudian. Jika seorang kandidat hanya bersandar pada praktik *vote buying* tanpa menyertainya dengan strategi lain seperti membangun kedekatan dengan calon pemilih atau memperkuat militansi tim sukses, besar kemungkinan ia akan menuai kekecewaan. Ini karena pada dasarnya uang bukan satu-satunya faktor penentu yang bisa memengaruhi preferensi pemilih, bahkan untuk daerah seperti Pati.

menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil, mereka umumnya juga mudah untuk dipengaruhi orang lain, baik berupa pengaruh positif maupun negatif. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Untuk itu, penting sekali mendapatkan pendidikan politik yang secara spesifik ditujukan kepada pemilih pemula. Dengan pemahaman mengenai pemilihan umum (pemilu) memungkinkan pemilih pemula menjadi pemilih cerdas yang sadar dalam menggunakan hak pilihnya dan dapat memilih pemimpin yang berkualitas.

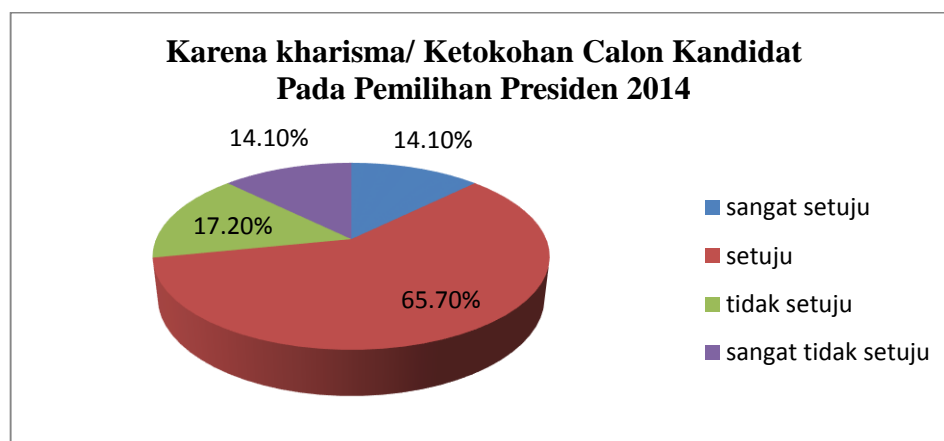
Hal tersebut menggambarkan kondisi pemilih pemula di kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan dari daftar pemilih tetap (DPT) kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 98.078 pemilih. Dan dari hasil rekapitulasi suara menunjukkan sebanyak 73.584 suara (75,03%) diantaranya dinyatakan sah, sebanyak 72.665 suara (74.08%), diantaranya tidak sah, sebanyak 919 suara (0.9%), dan sebanyak 24. 494 (25,91%) suara pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau yang biasa disebut dengan golongan putih (golput). Sebagian besar masyarakat di kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo menggunakan hak pilihnya, tidak terkecuali para pemilih pemula yang berada di kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo turut berpartisipasi memberikan suaranya kepada salah satu calon kandidat Capres dan Cawapres peserta pemilihan Presiden 2014 yang mereka ketahui. Meskipun hanya pemula,

Gambar 5.9



Berdasarkan hasil kuesioner pada pertanyaan no. 4 tentang track record salah satu calon kandidat dapat mempengaruhi pilihan pada pemilihan Presiden 2014, dari 99 responden yang memilih sangat setuju sebanyak 23 orang (23,2 %), yang memilih setuju sebanyak 56 orang (56,6 %), yang memilih tidak setuju sebanyak 15 orang (15,2 %), dan yang memilih sangat tidak setuju sebanyak 5 orang (5,1 %). Dengan demikian sebagian besar pemilih pemula di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo setuju bahwa track record salah satu calon kandidat dapat mempengaruhi pilihan pada pemilihan Presiden 2014.

Gambar 5.10



Dari pemaparan data diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa para pemilih pemula kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo termasuk pada jenis pemilih yang rasional. Hal ini juga bisa dilihat dari bahwa pemilih pemula memilih Capres dan Cawapres berdasarkan ketertarikan visi-misi calon kandidat pada pemilihan Presiden 2014.

C. Seberapa Besar Pengaruh *Money Politic* Terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi Di Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Presiden 2014

Pada pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa *money politic* di kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan Presiden 2014 terdapat bentuk-bentuk *money politic* diantaranya berupa uang, barang, serta fasilitas umum, namun dalam hal ini yang lebih sering dijumpai yaitu berupa uang. Kemudian, perilaku pemilih pemula masyarakat kecamatan Candi di kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan Presiden 2014 lebih didominasi oleh pemilih yang rasional.

Dalam mengetahui seberapa besar pengaruh *money politic* terhadap perilaku pemilih pemula masyarakat kecamatan Candi di kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan Presiden 2014. Maka, peneliti mengawalinya dengan membuat tabel tabulasi di masing-masing variabel, yakni variabel X yang membahas mengenai *money politic* dan variabel Y yang membahas mengenai perilaku pemilih pemula masyarakat kecamatan Candi di kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan Presiden 2014. Lebih lanjut, setelah membuat tabel tabulasi tersebut, peneliti selanjutnya menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan

Jika signifikansi > 0.10, maka Ho diterima

Jika signifikansi < 0.10, maka Ho ditolak

Berdasarkan harga signifikansi 0.003. Karena signifikansi < 0.10 maka Ho ditolak, yang berarti Ha diterima. artinya koefisien regresi *Money Politic* signifikan.

Hasil output SPSS versi 16.0 dengan teknik regresi linier sederhana yang terakhir adalah mengenai *Model Summary* yang nantinya untuk mengetahui berapa persen tingkat pengaruh antara variabel X tentang *money politic* terhadap perilaku pemilih pemula masyarakat kecamatan Candi di kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan Presiden 2014. Adapun hasil yang ditunjukkan bahwa hasil R Square sebesar 0.086, angka ini adalah hasil pengkuadratan dari harga koefisien korelasi, atau $0.293 \times 0.293 = 0.086$. R Square disebut juga dengan koefisien determinansi, yang berarti 8.6 % variabel perilaku pemilih pemula dipengaruhi oleh variabel *money politic*, sisanya sebesar 91,4 % oleh variabel lainnya. R Square berkisar dalam rentang antara 0 sampai 1, semakin besar harga Square maka semakin kuat hubungan kedua variabel.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan SPSS versi 16.0 diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang rendah antara *Money Politic* Terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi Di Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Presiden 2014, artinya 8,6 % perilaku pemilih pemula masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014 dipengaruhi oleh *money politic*, sisanya sebesar 91,4 % dipengaruhi oleh faktor lain.

507. *Kelima*, agama Budha dengan jumlah pemeluk 214. Uraian singkat diatas, memberikan gambaran pada kita bahwa jumlah agama berdasarkan penganutnya yang paling banyak terdapat pada agama Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat realigiusitas yang tinggi. Sebab dari jumlah penduduk yang berjumlah 167.248 jiwa, 11.4804 jiwa beragama Islam. Disamping agama Islam menjadi agama mayoritas masyarakat, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo juga didukung dengan banyaknya pondok pesantren yang ada diwilayah ini.

Aspek keagamaan yang ada di kecamatan Candi membuat strategi *money politic* tidak begitu efektif untuk mendulang perolehan suara dengan hasil yang rendah sebesar 8,6%. Semua itu disebabkan dengan adanya faktor lain sebesar 91,4%, yaitu karena karakteristik perilaku pemilih pemula di kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo yang tergolong empat jenis-jenis perilaku pemilih yakni pemilih rasional, kritis, tradisional, maupun skeptis. Dapat diketahui bahwa dari 99 responden, berdasarkan pada angket nomer 7 pada kolom karakteristik sosial, ekonomi & politik responden yang menanyakan “alasan saya memilih bakal satu calon kandidat pada pemilihan Presiden 2014?” yakni tertarik visi misi calon kandidat (Pemilih Rasional) sebanyak 84 responden tertarik dengan visi misi calon kandidat sedangkan 15 responden menyatakan tidak tertarik dengan visi misi calon kandidat. Kemudian responden yang memilih karena track record kandidat (Pemilih Kritis) sebanyak 59 responden dan 40 responden menyatakan tidak memilih berdasarkan track record calon kandidat. Selanjutnya responden yang memilih karena kharisma/ketokohan calon kandidat (Pemilih Tradisional)

